

Kebijakan Sosial Adaptif dan Ketahanan Rumah Tangga Miskin: Peran Strategis Perempuan Pencari Nafkah dalam Konteks Kerentanan Struktural

Syaifudin Suhri Kasim ^{1,*}; Asriani ²; Juhaepa ³; Ratna Supiyah ⁴; Asrani ⁵; Nada Kusuma ⁶
^{1,2,3,4,5,6} Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Correspondence : syaifudinskasim@uho.ac.id

Date of submission: 27 March 2026 | Date of acceptance: 29 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perempuan pencari nafkah memanfaatkan kebijakan sosial adaptif dalam membangun ketahanan rumah tangga miskin, mengidentifikasi faktor struktural yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, serta merumuskan arah reorientasi desain kebijakan yang lebih responsif gender dan multidimensional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap 15 perempuan pencari nafkah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai penyangga konsumsi (consumption buffer) yang memungkinkan perempuan mengelola risiko ekonomi rumah tangga dan melakukan diversifikasi pendapatan di sektor informal. Perempuan tidak sekadar menjadi penerima manfaat pasif, melainkan aktor strategis yang mengintegrasikan bantuan sosial dengan kerja informal dan jaringan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Namun, efektivitas kebijakan sosial dalam memperkuat ketahanan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti keterbatasan akses terhadap aset produktif, segmentasi pasar kerja informal, norma patriarkal, serta potensi jebakan ketergantungan program.

ABSTRACT

This study aims to analyze how female breadwinners utilize adaptive social policies to build the resilience of poor households, identify structural factors influencing their effectiveness, and formulate a direction for reorienting policy design to be more gender-responsive and multidimensional. This study uses a qualitative approach with a case study design of 15 female breadwinners receiving the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT). Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using thematic analysis. The results indicate that social assistance functions as a consumption buffer, enabling women to manage household economic risks and diversify income in the informal sector. Women are not merely passive beneficiaries but strategic actors who integrate social assistance with informal work and social networks to maintain family economic stability. However, the effectiveness of social policies in strengthening household resilience is influenced by structural factors, such as limited access to productive assets, informal labor market segmentation, patriarchal norms, and the potential for program dependency traps.

Keywords

kebijakan sosial adaptif, ketahanan rumah tangga, perempuan pencari nafkah, kerentanan struktural, gender dan kemiskinan

Keywords

adaptive social policy, household resilience, female breadwinners, structural vulnerability, gender and poverty

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menyangkut deprivasi dalam akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan partisipasi sosial (Alkire & Kanagaratnam, 2019; UNDP, 2023). Perspektif kemiskinan multidimensi menekankan bahwa kesejahteraan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh struktur peluang dan distribusi sumber daya yang timpang (Sen, 1999; OPHI, 2024). Dalam dekade terakhir, berbagai riset global menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan guncangan ekonomi; termasuk pandemi COVID-19, inflasi global, dan krisis biaya hidup; telah memperburuk kondisi rumah tangga miskin, khususnya di negara berkembang (World Bank, 2024; Sumner, Hoy, & Ortiz-Juarez, 2020; IMF, 2023; UNDESA, 2022). Laporan terbaru juga menegaskan bahwa pemulihan pascapandemi berlangsung tidak merata dan memperdalam kesenjangan gender serta pekerjaan informal (ILO, 2024; UN Women, 2023). Ketidakpastian kerja, dominasi sektor informal, serta lemahnya sistem perlindungan sosial menjadikan rumah tangga miskin sangat rentan terhadap risiko sosial-ekonomi (OECD, 2022; Gentilini et al., 2022).

Di Indonesia, meskipun tren garis kemiskinan nasional menunjukkan penurunan nominal dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kerentanan dan *near-poor population* masih signifikan (BPS, 2025; World Bank, 2023). Rumah tangga yang bergantung pada pekerjaan informal dan berpenghasilan tidak tetap menghadapi risiko tinggi jatuh kembali ke jurang kemiskinan ketika terjadi guncangan ekonomi (SMERU, 2023; TNP2K, 2022). Situasi ini semakin kompleks bagi rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan dan beban tanggungan tinggi, di mana perempuan memainkan peran ekonomi sekaligus domestik secara bersamaan (UN Women, 2024; Asian Development Bank, 2022). Studi menunjukkan bahwa feminisasi kemiskinan berkaitan erat dengan ketimpangan akses terhadap pekerjaan layak dan aset produktif (Chant, 2021; Kabeer, 2021).

Kebijakan sosial menjadi instrumen strategis dalam merespons kerentanan tersebut. Namun, perubahan sosial yang cepat menuntut pendekatan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap risiko dinamis (Devereux et al., 2021; Bowen et al., 2020). Konsep *adaptive social protection* menekankan integrasi perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan penguatan mata pencaharian (Mizunoya et al., 2022; World Bank, 2022). Di Indonesia, program seperti PKH dan BPNT tidak hanya berfungsi sebagai bantalan konsumsi, tetapi juga sebagai pintu masuk peningkatan akses layanan dasar dan inklusi ekonomi (Kemensos RI, 2025; Bappenas, 2024; UNICEF Indonesia, 2023).

Efektivitas kebijakan sosial adaptif sangat dipengaruhi oleh kapasitas internal rumah tangga dan modal sosial komunitas (Yasmi, 2023; Putnam, 2000). Perempuan pencari nafkah kerap memadukan kerja informal, usaha mikro, dan strategi diversifikasi pendapatan untuk menjaga stabilitas konsumsi (Molyneux, 2021; ILO,

2023). Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki akses terhadap transfer sosial dan pembiayaan mikro, dampaknya terhadap ketahanan pangan dan pendidikan anak cenderung lebih signifikan (FAO, 2023; IFAD, 2022). Hal ini menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penerima manfaat, melainkan agen strategis dalam memperkuat ketahanan rumah tangga.

Meski demikian, hambatan struktural tetap membatasi optimalisasi peran tersebut. Ketimpangan gender dalam akses pendidikan, kepemilikan aset, teknologi, dan pasar tenaga kerja terus mereproduksi kerentanan (World Bank, 2024; McGregor et al., 2022; UN Women, 2023). Norma patriarkal dan beban kerja perawatan yang tidak dibayar mempersempit ruang partisipasi ekonomi perempuan (ILO, 2024; OECD, 2022). Dalam perspektif ketahanan (*resilience*), kemampuan rumah tangga miskin untuk bertahan dan beradaptasi merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan publik, struktur sosial, dan kapasitas individu (Cannon & Müller-Mahn, 2020; Béné et al., 2021). Dengan demikian, penguatan kebijakan sosial adaptif yang sensitif gender menjadi prasyarat penting bagi pembangunan ketahanan rumah tangga miskin secara berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kebijakan sosial adaptif dan ketahanan rumah tangga miskin melalui fokus pada peran strategis perempuan pencari nafkah dalam konteks kerentanan struktural. Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada integrasi perspektif kebijakan sosial adaptif, analisis gender, dan kerentanan struktural; memperluas pemahaman tentang ketahanan rumah tangga miskin bukan hanya sebagai kapasitas teknis bertahan hidup, tetapi sebagai produk interaksi antara struktur sosial dan tindakan agen. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih sensitif gender, responsif terhadap konteks lokal, dan dapat memperkuat posisi perempuan dalam proses pemberdayaan ekonomi dan sosial

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan sosial adaptif dan ketahanan rumah tangga miskin melalui pengalaman perempuan pencari nafkah dalam konteks kerentanan struktural. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi proses sosial, praktik keseharian, serta negosiasi makna yang dilakukan aktor dalam menghadapi keterbatasan ekonomi, ketidakpastian pendapatan, dan relasi gender yang timpang. Desain studi kasus memberikan ruang untuk menganalisis interaksi antara struktur kebijakan dan agensi perempuan secara kontekstual dan holistik, sehingga tidak hanya memotret hasil kebijakan, tetapi juga proses adaptasi dan strategi bertahan hidup yang berkembang di tingkat rumah tangga.

Studi kasus difokuskan pada rumah tangga miskin penerima manfaat program perlindungan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini dipilih karena merepresentasikan bentuk kebijakan sosial adaptif yang dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial dan kapasitas ekonomi keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat dan dukungan konsumsi pangan. Dalam konteks transformasi sistem perlindungan sosial nasional, PKH dan BPNT menjadi instrumen penting dalam strategi pengurangan kemiskinan dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga rentan. Melalui fokus ini, penelitian menganalisis bagaimana desain kebijakan bertemu dengan praktik agensi perempuan dalam konteks sosial-ekonomi lokal pedesaan.

Penelitian dilakukan pada komunitas rumah tangga miskin di wilayah pedesaan dengan tingkat kerentanan ekonomi relatif tinggi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama atau berkontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga; (2) terdaftar sebagai penerima manfaat PKH atau BPNT; dan (3) berasal dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi rentan, seperti bekerja di sektor informal, memiliki pendapatan tidak tetap, dan memiliki tanggungan lebih dari dua orang. Jumlah informan utama sebanyak 15 orang. Untuk memperkaya perspektif dan memperoleh gambaran kontekstual yang lebih luas, penelitian juga melibatkan informan tambahan, yaitu pendamping sosial PKH, aparat desa, serta tokoh masyarakat setempat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur untuk menggali pengalaman subjektif perempuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga, strategi adaptasi terhadap krisis (misalnya kenaikan harga pangan atau kehilangan pekerjaan), pengalaman memanfaatkan bantuan sosial, perubahan posisi tawar dalam relasi domestik, serta hambatan struktural yang dihadapi, seperti keterbatasan akses kerja, aset produktif, dan modal sosial. Wawancara berlangsung antara 60–90 menit dan direkam dengan persetujuan informan guna menjaga akurasi data. Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami praktik keseharian perempuan dalam pembagian kerja domestik, aktivitas ekonomi informal, serta pola pengelolaan bantuan sosial dalam rumah tangga. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen kebijakan, laporan evaluasi program sosial, dan data statistik kemiskinan guna memetakan konteks struktural serta desain kebijakan yang melatarbelakangi pengalaman informan.

Penelitian ini melibatkan 15 perempuan pencari nafkah dari rumah tangga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dari 15 informan tersebut, 9 merupakan pencari nafkah utama (suami tidak bekerja atau bekerja tidak tetap), sementara 6 lainnya berperan sebagai pencari nafkah tambahan namun signifikan terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Sebagian

besar bekerja di sektor informal (pedagang kecil, buruh tani, pekerja harian, usaha rumahan).

Analisis data dilakukan secara tematik (thematic analysis) melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah transkripsi dan familiarisasi data untuk memahami keseluruhan narasi. Tahap kedua, open coding dilakukan untuk mengidentifikasi kategori awal yang muncul dari data, seperti strategi diversifikasi pendapatan, mekanisme penghematan, negosiasi domestik, dan persepsi terhadap bantuan sosial. Tahap ketiga, axial coding digunakan untuk menghubungkan kategori tersebut dengan konsep-konsep teoretis seperti ketahanan rumah tangga (household resilience), adaptasi ekonomi, dan kerentanan struktural berbasis gender. Tahap terakhir, selective coding dilakukan untuk membangun tema-tema besar yang menjelaskan hubungan antara kebijakan sosial adaptif dan strategi perempuan dalam memperkuat ketahanan rumah tangga. Proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoretis tentang kebijakan sosial adaptif, ketahanan sosial-ekonomi, serta relasi gender dalam struktur kemiskinan. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis terhadap dinamika kekuasaan dan struktur sosial yang melingkupi pengalaman perempuan.

Keabsahan dan validitas data dijaga melalui beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan utama dan informan pendukung. Kedua, triangulasi metode diterapkan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperkuat konsistensi temuan. Ketiga, member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara kepada beberapa informan untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti. Keempat, audit trail disusun secara sistematis untuk mendokumentasikan proses pengumpulan dan analisis data, sehingga transparansi dan dependabilitas penelitian dapat terjaga. Melalui langkah-langkah tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang kredibel, kontekstual, dan mampu memberikan kontribusi analitis terhadap studi kebijakan sosial adaptif dan ketahanan rumah tangga miskin berbasis pengalaman perempuan.

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Perempuan dalam Memanfaatkan Kebijakan Sosial Adaptif untuk Ketahanan Rumah Tangga

a. Bantuan Sosial sebagai “Modal Stabilitas Konsumsi”

Mayoritas informan menyatakan bahwa bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak diposisikan sebagai sumber pendapatan utama, melainkan sebagai penyangga konsumsi dasar (*buffer*). Bantuan tersebut dimanfaatkan secara strategis untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan pangan, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga.

Dengan demikian, pendapatan dari sektor informal; yang cenderung fluktuatif; dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih produktif, seperti pengembangan usaha kecil atau pelunasan utang. Seorang informan menegaskan, *“Kalau bantuan itu biasanya saya pakai untuk beli beras sama kebutuhan anak sekolah, jadi uang jualan bisa diputar lagi untuk tambah modal.”*

Pernyataan ini menunjukkan adanya rasionalitas ekonomi rumah tangga dalam mengelola sumber daya terbatas. Informan lain juga menyampaikan, *“Kalau tidak ada bantuan, kami susah atur uang karena penghasilan tidak menentu tiap hari, kadang ada, kadang tidak.”* Bahkan, dalam wawancara lanjutan, seorang perempuan kepala rumah tangga menuturkan, *“Bantuan itu seperti pegangan, jadi walaupun jualan sepi, kami masih bisa makan dan anak tetap sekolah.”* Narasi ini menegaskan bahwa bantuan sosial berperan penting dalam menjaga stabilitas konsumsi.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan pola manajemen risiko rumah tangga yang adaptif, di mana perempuan memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan bantuan sosial dengan pendapatan informal. Strategi ini memungkinkan terciptanya keseimbangan arus kas keluarga di tengah ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga sebagai *shock absorber* yang meredam dampak fluktuasi pendapatan harian dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.

b. Diversifikasi Pendapatan sebagai Strategi Adaptif

Sebanyak 12 dari 15 informan menunjukkan kecenderungan kuat dalam melakukan diversifikasi sumber pendapatan sebagai strategi adaptif menghadapi ketidakpastian ekonomi. Praktik ini diwujudkan melalui kombinasi pekerjaan, seperti berdagang kecil-kecilan di rumah, menjadi buruh harian, hingga menerima pesanan jasa berbasis rumah tangga. Strategi ini tidak hanya bertujuan menambah penghasilan, tetapi juga untuk menyebar risiko akibat fluktuasi pendapatan di sektor informal. Salah satu informan mengungkapkan: *“Kalau cuma mengandalkan satu pekerjaan, tidak cukup. Jadi saya jual kue pagi, siangnya ikut bantu di kebun orang, supaya ada tambahan.”* Hal ini menunjukkan adanya kesadaran reflektif dalam mengelola ketidakpastian ekonomi.

Selain itu, bantuan sosial yang diterima memberikan ruang psikologis dan finansial bagi informan untuk mengambil risiko ekonomi dalam skala kecil. Bantuan tersebut tidak semata digunakan untuk konsumsi, tetapi juga sebagai modal awal dalam mengembangkan usaha. Seorang informan menyatakan: *“Dari bantuan itu saya sisihkan sedikit untuk tambah barang jualan, jadi pelan-pelan bisa berkembang.”* Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebijakan sosial dimaknai secara aktif sebagai sumber daya produktif.

Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi berada pada posisi pasif sebagai penerima manfaat, melainkan menjadi aktor yang mampu mengoptimalkan peluang ekonomi. Seperti disampaikan oleh informan lain: *“Kami*

tidak bisa menunggu saja, harus pintar cari jalan sendiri supaya dapur tetap jalan." Ketahanan rumah tangga kemudian dibangun melalui kombinasi antara bantuan negara, fleksibilitas kerja informal, serta dukungan jaringan sosial seperti keluarga dan kelompok arisan. Dalam konteks ini, solidaritas sosial menjadi mekanisme penting, sebagaimana diungkapkan: *"Kalau ada kesulitan, biasanya kami saling bantu antar tetangga atau lewat arisan."* Dengan demikian, diversifikasi pendapatan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan relasional.

c. Reorganisasi Peran Gender dalam Rumah Tangga

Sebanyak 9 informan melaporkan adanya pergeseran relasi kuasa dalam rumah tangga seiring meningkatnya kontribusi ekonomi mereka, terutama melalui aktivitas di sektor informal dan diversifikasi sumber pendapatan. Perempuan tidak lagi sepenuhnya berada pada posisi domestik, tetapi mulai mengambil peran dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti mengatur keuangan keluarga, menentukan prioritas kebutuhan, hingga berkontribusi dalam keputusan investasi kecil. Salah satu informan mengungkapkan, *"Dulu saya hanya ikut saja, sekarang kalau mau beli sesuatu atau atur uang, suami juga tanya pendapat saya dulu."* Hal ini menunjukkan adanya peningkatan posisi tawar perempuan dalam struktur rumah tangga.

Namun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh redistribusi kerja domestik yang adil. Sebagian besar informan masih menghadapi beban ganda antara pekerjaan produktif dan reproduktif. Seorang informan menyatakan, *"Sekarang saya yang lebih banyak cari uang, tapi urusan rumah tetap saya juga yang kerjakan, dari masak sampai urus anak."* Informan lain menambahkan, *"Memang saya sudah ikut menentukan keputusan, tapi suami jarang bantu pekerjaan rumah."* Bahkan, ada informan yang menegaskan, *"Kalau capek itu pasti, tapi mau bagaimana lagi, pekerjaan rumah sudah dianggap tanggung jawab perempuan."*

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas ekonomi perempuan belum sepenuhnya mampu menggeser norma gender yang telah mengakar dalam kehidupan domestik. Dengan demikian, meskipun kebijakan sosial telah berhasil memperkuat kapasitas ekonomi perempuan, transformasi struktural dalam pembagian kerja domestik masih berlangsung secara parsial dan belum mencapai kesetaraan yang substantif.

2. Faktor Struktural yang Memperkuat atau Menghambat Efektivitas Kebijakan Sosial

a. Faktor Penguat

Salah satu faktor penguat utama dalam meningkatkan efektivitas kebijakan sosial adaptif adalah keberadaan modal sosial lokal yang tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga miskin. Jaringan sosial seperti kelompok PKH, arisan, dan komunitas keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi, tetapi juga sebagai sarana pertukaran informasi, dukungan emosional, serta solidaritas ekonomi. Melalui jaringan ini, perempuan memperoleh akses terhadap

informasi peluang usaha, bantuan tambahan, hingga strategi bertahan dalam situasi krisis. Seorang informan menyatakan, *"Kalau tidak ikut kelompok PKH dan arisan, saya tidak tahu ada bantuan tambahan atau cara pinjam modal kecil. Dari situ juga kami saling bantu kalau ada yang susah."* Keterlibatan aktif dalam jaringan sosial tersebut juga meningkatkan kepercayaan diri perempuan dalam mengambil keputusan ekonomi. Informan lain mengungkapkan, *"Dulu saya hanya ikut saja keputusan suami, tapi sekarang karena sering diskusi di kelompok, saya berani usul untuk buka usaha kecil di rumah."* Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi tawar perempuan dalam rumah tangga.

Faktor penguat lainnya adalah fleksibilitas sektor informal yang menjadi ruang utama aktivitas ekonomi informan. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai pedagang kecil, buruh lepas, atau pelaku usaha rumahan yang memungkinkan pengaturan waktu kerja secara mandiri. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi perempuan untuk menyeimbangkan peran domestik dan produktif secara simultan. Dalam kondisi keterbatasan struktural, kemampuan mengatur waktu menjadi strategi adaptif yang sangat penting. Seorang informan menjelaskan, *"Saya jualan kue di rumah, jadi bisa tetap urus anak dan rumah, sambil cari uang. Kalau ada bantuan, saya pakai untuk beli bahan tambahan."* Fleksibilitas ini juga memungkinkan pemanfaatan bantuan sosial secara lebih optimal, baik sebagai tambahan modal usaha maupun sebagai penyangga saat pendapatan menurun. Informan lain menambahkan, *"Kalau lagi sepi pembeli, bantuan itu sangat membantu untuk bertahan, jadi tidak langsung habis."* Dengan demikian, fleksibilitas sektor informal memperkuat daya adaptasi ekonomi rumah tangga dan mendukung keberlanjutan pengentasan kemiskinan.

b. Faktor Penghambat

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang membatasi dampak jangka panjang kebijakan sosial. Pertama, ketimpangan akses terhadap aset produktif menjadi kendala utama. Sebanyak 11 informan tidak memiliki lahan, tabungan signifikan, maupun akses terhadap kredit formal. Ketiadaan aset ini membuat usaha sulit berkembang dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Seorang informan menyatakan, *"Kami mau usaha lebih besar, tapi tidak punya tanah atau jaminan untuk pinjam di bank. Jadi hanya bisa jual kecil-kecilan saja."* Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan aset tidak hanya menghambat ekspansi ekonomi, tetapi juga memperkuat siklus kerentanan.

Kedua, segmentasi pasar kerja informal ditandai oleh upah rendah dan ketidakpastian pendapatan. Bantuan sosial seringkali hanya cukup untuk menjaga konsumsi minimum, bukan untuk mendorong mobilitas ekonomi berkelanjutan. Hal ini tercermin dari pernyataan informan, *"Pendapatan tidak menentu, kadang ada kadang tidak. Bantuan hanya cukup untuk makan, belum bisa untuk menabung atau usaha."* Situasi ini menegaskan bahwa struktur ekonomi informal membatasi peluang peningkatan kesejahteraan.

Ketiga, norma patriarkal masih membatasi otonomi ekonomi perempuan. Meskipun berkontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga, keputusan ekonomi strategis kerap didominasi suami atau keluarga besar. Salah satu informan perempuan mengungkapkan, *“Saya yang jual di pasar, tapi kalau mau pakai uang untuk usaha, tetap harus izin suami.”* Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi kuasa yang mempengaruhi pemanfaatan kapabilitas perempuan.

Keempat, muncul kekhawatiran kehilangan bantuan ketika pendapatan meningkat. Situasi ini menciptakan dilema insentif dan potensi ketergantungan program (*dependency trap*). Seorang informan menyatakan, *“Kalau penghasilan naik sedikit, takut bantuan dihentikan. Jadi kadang lebih baik tetap seperti ini.”* Kondisi ini secara tidak langsung menghambat transformasi ekonomi jangka panjang dan memperkuat stagnasi kesejahteraan rumah tangga miskin.

3. Reorientasi Desain Kebijakan Sosial agar Lebih Responsif Gender dan Multidimensional

Berdasarkan temuan lapangan, kebijakan sosial adaptif perlu direorientasikan dalam tiga arah strategis agar tidak hanya berfungsi sebagai bantalan sementara, tetapi juga sebagai instrumen transformasi struktural bagi rumah tangga miskin. Realitas empiris menunjukkan bahwa rumah tangga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga hambatan struktural dan relasi kuasa domestik yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Pertama, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program bantuan tunai seperti PKH dan bantuan pangan terbukti membantu menjaga stabilitas konsumsi (*consumption smoothing*), terutama saat terjadi guncangan ekonomi. Seorang informan perempuan mengungkapkan: *“Kalau bantuan itu ada, kami bisa makan cukup, anak-anak tetap sekolah. Tapi kalau tidak ada tambahan usaha, ya habis begitu saja, tidak bisa berkembang.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai penyangga jangka pendek, tetapi belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Informan lain menambahkan: *“Kami mau usaha kecil-kecilan, tapi tidak tahu mulai dari mana, tidak ada modal, tidak ada yang ajarkan juga.”* Oleh karena itu, program bantuan perlu dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar lokal, akses kredit mikro berbunga rendah yang inklusif, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Pendekatan ini akan mendorong pergeseran dari sekadar mempertahankan konsumsi menuju pembangunan aset (*asset building*), sehingga rumah tangga memiliki fondasi ekonomi yang lebih kokoh dalam jangka panjang.

Kedua, desain kebijakan harus lebih sensitif terhadap dimensi gender. Temuan menunjukkan bahwa perempuan penerima manfaat sering menanggung beban kerja ganda—sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola kerja domestik. Kondisi ini tercermin dari pernyataan informan: *“Saya pagi ke kebun, siang jualan, tapi tetap harus urus anak dan rumah. Suami kadang bantu, tapi lebih banyak saya yang tanggung.”* Hal ini menunjukkan bahwa intervensi ekonomi tanpa mempertimbangkan relasi gender

berpotensi menambah beban perempuan. Informan lain juga menyampaikan: *"Kalau ada pelatihan, sering tidak bisa ikut karena harus jaga anak. Tidak ada yang gantikan."* Oleh karena itu, kebijakan perlu disertai penyediaan layanan penitipan anak berbasis komunitas, fleksibilitas jadwal pelatihan atau kegiatan pemberdayaan, serta edukasi kesetaraan gender di tingkat keluarga dan komunitas. Tanpa intervensi pada relasi kuasa domestik, ketahanan rumah tangga tetap bertumpu pada kerja reproduktif perempuan yang tidak diakui secara ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan menjadi "penopang utama" tanpa dukungan struktural yang memadai.

Ketiga, kebijakan perlu mengadopsi pendekatan multidimensional dan berbasis kerentanan. Intervensi tidak cukup hanya menargetkan aspek pendapatan, tetapi juga harus mempertimbangkan akses kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, serta kepemilikan aset produktif. Salah satu informan menyatakan: *"Masalah kami bukan hanya uang, tapi juga kalau sakit susah berobat, anak sekolah juga butuh biaya, belum lagi harga pangan naik."* Pernyataan ini menegaskan bahwa kemiskinan bersifat kompleks dan saling terkait antar dimensi. Informan lain menambahkan: *"Kalau ada bantuan, bagus, tapi kadang tidak sesuai kebutuhan. Kami butuh juga alat kerja atau bantuan usaha."* Dengan memahami profil kerentanan rumah tangga secara komprehensif, kebijakan sosial adaptif dapat dirancang lebih tepat sasaran, responsif terhadap risiko, dan berorientasi pada penguatan ketahanan jangka panjang.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan rumah tangga miskin bukan sekadar hasil intervensi kebijakan, melainkan produk interaksi antara desain kebijakan sosial, strategi adaptif perempuan, dan struktur sosial yang membingkai peluang serta batasan. Perempuan pencari nafkah berperan sebagai aktor strategis yang mengkonversi bantuan sosial menjadi stabilitas konsumsi dan peluang ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan: *"Kalau tidak saya yang usaha, mungkin kami tidak bisa bertahan. Bantuan itu hanya cukup untuk beberapa waktu."* Namun demikian, tanpa reformasi struktural seperti peningkatan akses terhadap aset produktif, redistribusi kerja domestik, dan perlindungan bagi pekerja informal, kebijakan sosial berisiko memperkuat feminisasi tanggung jawab kesejahteraan.

Dengan demikian, kebijakan sosial adaptif yang efektif harus bergerak dari pendekatan protektif menuju transformasional. Kebijakan tidak hanya berfungsi melindungi dari guncangan, tetapi juga harus mampu mengurangi kerentanan struktural sekaligus memperkuat agensi perempuan dalam jangka panjang. Transformasi ini penting agar rumah tangga miskin tidak sekadar bertahan, tetapi mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan dan bermartabat.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan sosial adaptif, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi ekonomi rumah tangga miskin. Bantuan sosial terbukti berperan sebagai

consumption buffer yang memungkinkan stabilisasi konsumsi di tengah volatilitas pendapatan sektor informal.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat kerangka adaptive social protection (Devereux et al., 2021; Bowen et al., 2020), yang menekankan bahwa perlindungan sosial tidak hanya bersifat reaktif terhadap guncangan, tetapi juga proaktif dalam memperkuat kapasitas adaptasi rumah tangga. Dalam konteks ini, perempuan sebagai aktor utama menunjukkan kemampuan untuk mengelola bantuan sebagai bagian dari strategi manajemen risiko, bukan sekadar konsumsi pasif.

Lebih jauh, praktik ini mencerminkan rasionalitas ekonomi rumah tangga miskin yang sejalan dengan pendekatan livelihood resilience, di mana sumber daya eksternal (bantuan sosial) dikombinasikan dengan strategi internal (diversifikasi kerja) untuk menjaga keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan sosial berfungsi sebagai *shock absorber* sekaligus *enabler* bagi aktivitas ekonomi produktif skala mikro.

Salah satu kontribusi utama penelitian ini adalah pergeseran perspektif dari perempuan sebagai *beneficiary* menjadi **strategic agent** dalam sistem ketahanan rumah tangga. Temuan menunjukkan bahwa perempuan secara aktif mengintegrasikan bantuan sosial, kerja informal, dan jaringan sosial untuk membangun stabilitas ekonomi keluarga.

Hal ini konsisten dengan studi Gender and Development yang menekankan pentingnya agensi perempuan dalam pembangunan ekonomi rumah tangga (Kabeer, 2021; Chant, 2021). Namun, penelitian ini memperluas literatur dengan menunjukkan bahwa agensi tersebut tidak hanya muncul dari akses terhadap sumber daya, tetapi juga dari kemampuan mengelola ketidakpastian secara adaptif.

Selain itu, temuan ini juga mengafirmasi konsep feminization of responsibility, di mana perempuan menjadi aktor utama dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga, terutama dalam kondisi krisis. Namun, berbeda dengan literatur sebelumnya yang cenderung melihat fenomena ini sebagai bentuk beban, penelitian ini menunjukkan dimensi ambivalen: perempuan memperoleh peningkatan posisi tawar, tetapi tetap berada dalam struktur ketimpangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan rumah tangga tidak dapat dipahami sebagai kondisi statis, melainkan sebagai proses dinamis yang dibentuk oleh interaksi antara kebijakan, struktur sosial, dan agensi individu. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif social resilience theory (Béné et al., 2021; Cannon & Müller-Mahn, 2020), yang menekankan bahwa ketahanan merupakan hasil dari relasi sosial dan distribusi kekuasaan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial adaptif; melalui skema seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); memiliki peran penting dalam menopang ketahanan rumah tangga miskin,

terutama ketika dimanfaatkan secara strategis oleh perempuan pencari nafkah. Namun, ketahanan tersebut bukanlah hasil otomatis dari desain kebijakan, melainkan produk interaksi dinamis antara bantuan negara, strategi adaptif perempuan, dan struktur sosial yang membatasi maupun memungkinkan tindakan mereka.

Pertama, perempuan pencari nafkah terbukti tidak sekadar menjadi penerima manfaat pasif, tetapi aktor strategis yang mengonversi bantuan sosial menjadi stabilitas konsumsi, diversifikasi pendapatan, dan manajemen risiko rumah tangga. Bantuan sosial berfungsi sebagai *buffer* yang memungkinkan perempuan mengambil keputusan ekonomi lebih berani dalam sektor informal. Ketahanan rumah tangga dibangun melalui kombinasi bantuan negara, kerja fleksibel, dan mobilisasi modal sosial lokal.

Kedua, efektivitas kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor struktural. Modal sosial dan fleksibilitas kerja informal memperkuat kapasitas adaptasi perempuan. Sebaliknya, ketimpangan akses terhadap aset produktif, segmentasi pasar kerja, norma patriarkal, serta potensi jebakan ketergantungan program menjadi hambatan serius bagi mobilitas ekonomi jangka panjang. Dalam kondisi ini, ketahanan rumah tangga sering kali bersifat rapuh dan bergantung pada intensifikasi kerja perempuan.

Ketiga, desain kebijakan sosial perlu direorientasikan dari pendekatan protektif menuju pendekatan transformasional. Integrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, sensitivitas terhadap beban kerja ganda perempuan, serta pendekatan berbasis kerentanan multidimensional menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan yang berkelanjutan. Tanpa perubahan struktural; terutama dalam akses aset, redistribusi kerja domestik, dan pengakuan atas kerja reproduktif; kebijakan sosial berisiko mereproduksi feminisasi tanggung jawab kesejahteraan.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan rumah tangga miskin merupakan proses sosial-politik yang dibentuk oleh relasi kuasa dan ketimpangan struktural, bukan sekadar kapasitas teknis bertahan hidup. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan perlunya desain kebijakan sosial yang lebih responsif gender, adaptif terhadap dinamika lokal, dan berorientasi pada pembangunan kapasitas jangka panjang perempuan sebagai aktor kunci dalam ketahanan keluarga dan pembangunan sosial. Dengan demikian, penguatan ketahanan rumah tangga miskin mensyaratkan bukan hanya perluasan cakupan bantuan sosial, tetapi transformasi struktural yang menempatkan perempuan bukan sebagai beban adaptasi krisis, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, kapasitas, dan ruang tawar yang setara.

Referensi

- Asian Development Bank. (2022). *Gender equality and social protection in Asia and the Pacific*. ADB.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik kemiskinan & ketimpangan Indonesia 2025*. BPS RI.
- Bappenas. (2024). *Laporan pembangunan nasional 2024: Transformasi perlindungan sosial adaptif*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Béné, C., Frankenberger, T., & Nelson, S. (2021). Resilience and food security: Toward a systems-level approach. *Global Food Security*, 28, 100512. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100512>
- Bowen, T., del Ninno, C., Andrews, C., Coll-Black, S., Gentilini, U., Johnson, K., Kawasoe, Y., Kryeziu, A., Maher, B., & Williams, A. (2020). *Adaptive social protection: Building resilience to shocks*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1575-1>
- Cannon, T., & Müller-Mahn, D. (2020). *Resilience: A critical perspective*. Routledge.
- Chant, S. (2021). Feminisation of poverty: Concepts, controversies and future directions. *Gender & Development*, 29(2–3), 245–262.
- Devereux, S., Boeckx, L., & Sabates-Wheeler, R. (2021). Social protection in times of crisis: Adaptive programmes and approaches. *Journal of International Development*, 33(8), 1405–1422.
- FAO. (2023). *The status of women in agrifood systems*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Gentilini, U., Almenfi, M., Blomquist, J., et al. (2022). *Social protection and jobs responses to COVID-19: A real-time review of country measures*. World Bank.
- IFAD. (2022). *Rural women and resilience: Empowerment pathways in fragile contexts*. International Fund for Agricultural Development.
- ILO. (2023). *Women and men in the informal economy: A statistical update*. International Labour Organization.
- ILO. (2024). *World employment and social outlook 2024: Trends*. International Labour Organization.
- IMF. (2023). *World economic outlook 2023: Navigating global divergences*. International Monetary Fund.
- Kabeer, N. (2021). Gender, livelihood capabilities and women's economic empowerment. *Feminist Economics*, 27(1–2), 1–28.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Evaluasi program PKH dan BPNT 2020–2024*. Kemensos RI.
- McGregor, J. A., Camfield, L., & Woodcock, A. (2022). Needs, rights and wellbeing: Perspectives on gender and poverty. *Journal of Human Development and Capabilities*, 23(4), 567–583.
- McGregor, J. A., Sumner, A., & Kahyarara, G. (2022). *Gender and poverty: International approaches and insights*. Oxford University Press.

- Mizunoya, S., Beazley, R., & Solórzano, A. (2022). Linking social protection and resilience: Evidence from adaptive social protection systems. *Development Policy Review*, 40(S1), e12576.
- Mizunoya, S., Mitra, S., & Nguyen, Q. T. (2022). Adaptive social protection: Opportunities and challenges. *World Development*, 151, 105757.
- Molyneux, M. (2021). The role of women's labor in household resilience: Informality and coping mechanisms. *Development and Change*, 52(2), 325–349.
- OECD. (2022). *Social protection system review: Building resilience and inclusive growth*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OPHI. (2024). *Global multidimensional poverty index 2024*. Oxford Poverty and Human Development Initiative.
- SMERU Research Institute. (2023). *Kerentanan rumah tangga dan dinamika kemiskinan pascapandemi*. SMERU.
- Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020). *Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty*. United Nations University.
- TNP2K. (2022). *Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan 2022–2024*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- UN DESA. (2022). *World social report 2022: Inequality in a rapidly changing world*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- UN Women. (2023). *Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023*. UN Women.
- UN Women. (2024). *Women's economic empowerment and social protection in Asia-Pacific*. UN Women Regional Office for Asia and the Pacific.
- UNDP. (2023). *Human development report 2023/2024*. United Nations Development Programme.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Social protection for children and families in Indonesia*. UNICEF.
- World Bank. (2022). *Shock-responsive social protection systems: Lessons from global practice*. World Bank.
- World Bank. (2023). *Indonesia poverty assessment: Pathways toward economic resilience*. World Bank.
- World Bank. (2024a). *Poverty and shared prosperity 2024: Reversals of fortune*. World Bank.
- World Bank. (2024b). *Poverty and shared prosperity 2024: Structural drivers in a changing world*. World Bank Group.
- Yasmi, Y. (2023). Perempuan pencari nafkah dan strategi ketahanan rumah tangga dalam konteks pasar informal di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 15(3), 215–229.